

Bogor, 4 Agustus 2023

Sikap Petani Swadaya Bersertifikasi Sawit Berkelanjutan pada EUDR dan Rekomendasi untuk Gugus Tugas EUDR Indonesia

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, seluruh Petani yang tergabung dalam Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI) yang terdiri dari 48 Organisasi dengan jumlah Petani 13.103 dengan luas lahan 31.623 Ha yang telah bersertifikat ISPO, RSPO dan ISCC ingin menyampaikan pandangan dan rekomendasi terhadap sikap pemerintah Indonesia terhadap EUDR.

Kami sangat mengapresiasi serta mendukung aksi nyata pemerintah dengan membentuk Gugus Tugas (Task Force) untuk menyikapi kebijakan EUDR dan keberlakuannya di Indonesia. Kami memandang, EUDR sangat memberikan dampak serius pada Petani kecil terutama Petani sawit swadaya di Indonesia, yang memiliki peran strategi pada rantai pasok industri kelapa sawit di Indonesia. Setidaknya lebih dari 4 juta petani akan terdampak dari penerapan kebijakan EUDR. Seperti diketahui, dengan adanya mandat perpres No. 44 Tahun 2020 tentang ISPO para petani sedang perlahan melakukan perbaikan, dimulai dari proses legalitas, GAP sampai bagaimana menerapkan ketelusuran buah TBS.

Kami dari Petani Swadaya yang tergabung dalam FORTASBI bukan menolak kebijakan no deforestasi, namun sebaliknya mendukung penuh kebijakan yang berkenaan dengan praktek berkelanjutan, no deforestasi dan no eksploitasi. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya komitmen Petani swadaya untuk terlibat pada praktek kelapa sawit yang berkelanjutan melalui skema sertifikasi ISPO, RSPO dan ISCC. Hingga tahun 2022, Jumlah Petani bersertifikat berkelanjutan (ISPO, RSPO dan ISCC) mencapai **27.000 petani**, dengan luas lahan yang telah bersertifikat berkelanjutan melalui skema RSPO, ISPO dan ISCC mencapai **54.579 Ha**. Jika dikonversi dari 1 Ha menghasilkan 18 - 20 ton TBS/Ha/tahun, maka total TBS yang diproduksi secara berkelanjutan mencapai **1.091.580 ton TBS** atau sekitar **218.316 ton CPO** bersertifikat dan **22.104 ton PKO** bersertifikat berkelanjutan. Angka ini belum menggambarkan dari total luas perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Petani swadaya yang angkanya mencapai 6,4 juta ha, namun ini upaya dari petani swadaya untuk membuktikan adanya transformasi praktek keberlanjutan dalam pengelolaan kebun sawit Tapi pencapaian ini tidak dapat diabaikan begitu saja, meskipun belum signifikan, namun pencapaian ini membuktikan komitmen yang tinggi dari Petani swadaya untuk menjadi bagian dari rantai pasok yang transparan dan berkelanjutan.

Untuk itu, kami dari Petani swadaya ingin menyampaikan usulan kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Gugus Tugas yang akan melakukan pertemuan Perdana dengan pihak EU pada bulan Agustus 2023, untuk mendiskusikan mengenai beberapa point penting yang dapat dijadikan bahan untuk negosiasi dengan EU. Antara lain:

1. Pasar EU harus mempertimbangkan kemampuan dan tata waktu agar petani swadaya dapat memenuhi legalitas untuk mendukung ketelusuran sumber buah. Penerapan Regulasi EUDR ini hendaknya dilakukan secara bertahap untuk Petani swadaya. EU bersama dengan pemerintah Indonesia mempersiapkan tahapan persyaratan yang dapat dipenuhi oleh petani, disertai dengan tata waktunya. Tantangan terbesar dilapangan adalah legalitas dan ketidakmampuan untuk melakukan penelusuran sumber buah. Saat ini, cukup banyak petani yang belum memiliki kesadaran pentingnya legalitas lahan dan legalitas usaha – budidaya Perkebunan. Oleh karena hal itu, perlu ada sinergisitas antara para pihak mendorong percepatan legalitas ini, tentunya melalui dukungan penuh dari pemerintah (pusat dan daerah), pelaku usaha Perkebunan sawit dan asosiasi bisnis karena ini semua saling terkait. Selanjutnya, menerapkan ketelusuran bagi petani swadaya memerlukan proses dan waktu karena ada terdapat keterbatasan secara dana, waktu, pengetahuan, dan dukungan teknologi. Kondisi ini tentunya berbeda dengan petani yang bermitra dengan pabrik kelapa sawit (mills), melalui dukungan perusahaan sebagian atau seluruh kebunnya sudah ter-petakan sehingga buah yang masuk dapat ditelusuri. Pada kondisi lapangan, tidak semua petani swadaya sudah ter-organisir dengan baik membentuk kelompok, koperasi dan asosiasi. Sebagian besar dari mereka masih mengelola perorangan dan menjual langsung ke agen (pedagang perantara), petani seperti ini cukup sulit dan memerlukan waktu untuk didorong memenuhi EUDR. Dengan jumlah Petani swadaya yang cukup besar mencapai 2,6 juta Petani dengan luas 6,7 juta ha dan tersebar diseluruh Indonesia. Maka EU harus pertimbangan pendekatan bertahap adalah solusi untuk memastikan bahwa Petani swadaya tidak terlempar jauh dari perdagangan sawit berkelanjutan.
2. Mendorong EU untuk memprioritaskan Perusahaan yang mendukung dan mengolah produk yang berasal dari Petani swadaya; Banyak Perusahaan besar, yang supply basenya 20-25% berasal dari Petani swadaya. Jika EU ingin mendukung peningkatan livelihood Petani swadaya, dan mendukung keterlibatan Petani swadaya dalam memproduksi produk minyak sawit dari praktek no deforestasi, maka EU harus mempertimbangkan untuk memberikan prioritas pasar bagi Perusahaan yang memang mengolah produk Petani swadaya.
3. Mendorong EU untuk Kembali mempertimbangkan produk yang dihasilkan oleh Petani swadaya yang telah menerapkan prinsip dan standar minyak sawit berkelanjutan melalui skema sertifikasi ISPO, RSPO dan ISCC, untuk dapat diprioritaskan masuk pasar EU. Karena jika tidak, maka ada sekitar 218.316 ton CPO dan 22.104 ton PKO yang bersertifikat sustainability akan terlempar masuk kedalam pasar yang tidak sustainable, dan tidak akan mendapatkan manfaat apapun, sehingga situasi ini akan mendorong Petani untuk Kembali pada model pertanian yang konvensional (tidak ramah lingkungan dan mengabaikan praktek berkelanjutan).
4. Mekanisme insentif harus didorong agar pasar EU tidak hanya memberikan tanggung jawab kepada produser termasuk Petani swadaya dalam memenuhi regulasi ini, tapi juga memberikan hak dalam bentuk incentive kepada produser termasuk Petani swadaya, karena telah berupaya dalam menghasilkan produk yang sustainable dan tidak dari praktek deforestasi dan sesuai dengan persyaratan EUDR. EU harus belajar dari model incentive yang telah disediakan oleh skema sertifikasi, khususnya sertifikasi RSPO, dimana incentive melalui

pembelian kredit disediakan oleh pembeli untuk seluruh Petani yang telah bersertifikat RSPO sesuai dengan tonase TBS yang dihasilkan, dan pemberian incentive ini adalah bentuk komitmen pembeli untuk membagi tanggung jawab dalam mendorong produksi sawit berkelanjutan dari Petani swadaya.

4 hal diatas kami sampaikan kepada Gugus Tugas untuk dapat menjadikan usulan kami ini sebagai masukan untuk memperkuat negoisasi dengan EU melalui Gugus Tugas yang akan dibentuk. Petani swadaya adalah pihak penting bagi ekonomi Indonesia, Petani swadaya berkontribusi sebesar 41% produksi sawit secara nasional. Keterlibatan Petani swadaya dalam industry ini sangat besar, sekitar 2,6 juta Petani yang mengantungkan hidupnya disektor ini. Jika masing-masing keluarga Petani memiliki 5-6 anggota keluarga, dapat dibayangkan ada sekitar 13 juta jiwa yang akan mendapatkan dampak dari kebijakan EUDR ini.

Demikian, surat ini kami sampaikan, untuk menjadi pertimbangan dan perhatian kita semua.

Hormat kami,



H. Narno Bersama seluruh anggota FORTASBI

No	Nama	Kota/Kab/Propinsi	Jumlah Anggota	Total Lahan (ha)
1	UD Lestari	Batubara – Sumut	626	915
2	Koperasi Konsumen Bersatu Makmur Jaya	Pemantang Siantar, SUMUT	271	659
3	Koperasi Gaharu Seratus Bosar Maligas	Simalungun, Sumut	232	526.31
4	Asosiasi Petani Kelapa Sawit Swadaya Mandiri	Kuantan Singingi, Riau	76	151
5	Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah	Pelalawan, Riau	501	1,048
6	Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mendaluh FPS – MRM	Tanjung Jabung Barat, Jambi	318	787
7	Gapoktan Tanjung Sehati	Merangin, Jambi	566	762.42
8	Asosiasi Cahaya Putra Harapan (ACPH)	Batanghari, Jambi	406	431
9	Asosiasi Petani Berkah Mandah Lestari (APBML)	Tanjung Jabung Barat, Jambi	291	707
10	KUD Makarti	Muaro Jambi, Jambi	177	461
11	KUD Marga Jaya	Muaro Jambi, Jambi	303	610,65
12	KUD Teratai Biru	Musi Banyuasin, Sumsel	183	318.17
13	KUD Damai	Lahat, Sumsel	101	301.94

14	KUD Karya Lestari	Musi Rawas Utara, Sumsel	164	707.5
15	KUD Karya Mulya	Musi Rawas Utara, Sumsel	150	323.45
16	KUD Marga Makmur	Musi Rawas, Sumsel	156	445.43
17	KUD Mekar Sari	Musi Rawas, Sumsel	296	498
18	KUD Pemura	Musi Rawas Utara, Sumsel	182	578.19
19	KUD Permai Jaya	Lahat, Sumsel	365	680.9
20	KUD Sari Makmur	Musi Rawas, Sumsel	162	703.76
21	KUD Sumber Rejeki	Musi Rawas Utara, Sumsel	80	519.961
22	KUD Tuhu Asih	Musi Rawas Utara, Sumsel	262	805.75
23	BUMDES "Karya Mandala Makmur"	Kotawaringin Barat, Kalteng	214	393.64
24	POSYANTEK Desa "Bersama"	Kotawaringin Barat, Kalteng	199	390
25	Koperasi Sawit Bangkit	Seruyan, Kalteng	175	287.964
26	KUD Sawit Jaya	Kotawaringin Barat, Kalteng	176	331.21
27	KUD Tani Subur	Kotawaringin Barat, Kalteng	704	1457.85
28	Asosiasi Petani Kelapa Sawit Mandiri	Kotawaringin Barat, Kalteng	408	994,81
29	KUD Tridaya	Kalimantan Tengah	210	711
30	Koperasi Jasa Mutiara Kongbeng	Kutai Timur, Kaltim	148	220.53
31	Asosiasi Petani Swadaya Keling Kumang	Sekadau, Kalbar	501	771.79
32	Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa sawit Siak Pelalawan	Pelalawan, Riau	367	1424
33	PPKS Tayo Barokah	Rohul, Riau	150	326
34	Koperasi Beringin Jaya	Siak, Riau	209	400
35	Koperasi Sawit Jaya	Siak, Riau	114	245
36	Forum Petani Sawit Swadaya Semarak Mudo	Rohul, Riau	295	620
37	KSU Marga Indah	Kutim, Kalimantan Timur	169	420
38	Koperasi Mulya Bakti	Oku, Sumatera Selatan	75	191
39	KUD Mitra Bersama	Oku, Sumatera Selata	38	130
40	Koperasi Konsumen Tebing Tinggi Pangkatan Sejahtera	Labuhan Batu, SUMUT	239	685.33
41	Koperasi Produksi Rimba Harapan	Sintang, Kalimantan Barat	74	123
42	KSU Pantun Sejahtera	Kutim, Kaltim	131	460
43	KSU Makarti	Kutim, Kaltim	172	436
44	Koperasi Mutiara Bumi	Batanghari, Jambi	72	216
45	PPSMH	Musi Banyu Asin, Sumsel	217	350
46	Koperasi Rangan Jaya	Paser Kalimantan Timur	118	406
47	Koperasi Belayan Sejahtera	Kutai Kertanegara Kalimantan Timur	1.026	3.227
48	Perkumpulan Petani Mitra Harapan	Ketapang Kalimantan Barat	312	1.392,95

